

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep identitas majemuk Amartya Sen menekankan pentingnya menerima dan mengakui setiap orang sebagai makhluk sosial yang dapat menciptakan identitas naratifnya sendiri. Sikap menerima dan mengakui identitas naratif setiap individu secara gamblang menampilkan sisi kesetaraan derajat dan hak individu sebagai subyek yang otonom. Dalam arti bahwa, setiap individu memiliki kesempatan dan juga kebebasan yang sama untuk memilih pelbagai macam kelompok afiliasinya tanpa didikte oleh para penguasa (*elite* politik). Selain itu, konsep identitas majemuk secara tegas menolak pandangan tentang identitas tunggal sebagai satu-satunya identitas yang absolut.

Dalam konsep identitas majemuk, Amartya Sen berusaha mempertemukan dan mempersatukan pelbagai macam perbedaan di bawah narasi identitas majemuk. Prinsip dasar identitas majemuk adalah, tidak ada seorang pun yang memiliki identitas tunggal sebagai satu-satunya identitas yang absolut. Identitas sebagai hasil konstruksi manusia tidak hanya meliputi satu aspek tertentu, melainkan secara menyeluruh bertautan dengan aspek-aspek lainnya. Konsep identitas majemuk meyakini bahwa, realitas masyarakat yang plural selalu memiliki potensi bagi identitas naratif yang kompleks. Maka, kebebasan individu untuk mengidentifikasi pelbagai macam identitasnya harus diterima dan dihargai oleh siapa pun.

Dalam merumuskan gagasan identitas majemuk, Amartya Sen mendasarkannya pada konsep pengakuan identitas yang lain. Pengakuan terhadap identitas yang lain merupakan basis terciptanya persatuan di dalam keberagaman. Persatuan di dalam keberagaman menjadi dasar yang kokoh untuk merawat setiap perbedaan pandangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebuah realitas sosial yang tidak dapat dibantah bahwa, dalam kehidupan masyarakat yang plural, kita semua dituntut untuk mengakui identitas orang lain. Identitas majemuk yang dirumuskan oleh Amartya Sen

merupakan suatu tindakan konkrit manusia yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dan konflik di dalam kehidupan bermasyarakat yang plural.

Identitas majemuk Amartya Sen dapat dipandang sebagai dasar yang kuat bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Atas dasar itu, identitas majemuk hadir sebagai basis hidup bersama yang berorientasi pada sikap solidaritas, toleransi, dan juga pengakuan identitas yang lainnya. Fakta ini dapat ditemukan di dalam prinsip-prinsip identitas majemuk yang menekankan pentingnya sikap solidaritas, toleransi dan pengakuan terhadap identitas yang lain. Sikap solidaritas, toleransi dan pengakuan terhadap identitas yang lain, merupakan nilai fundamental dalam masyarakat plural yang harus dijaga dan dipertahankan agar terciptanya suatu tatanan sosial politik yang adil. Dengan demikian, identitas majemuk menjadi sebuah landasan pemikiran yang bebas represif dan menghargai individu sebagai subyek otonom yang mampu mengidentifikasi pelbagai macam identitas naratifnya, sehingga hal ini sangat relevan dalam konteks kehidupan bersama sebagai masyarakat yang plural.

Identitas majemuk Amartya Sen sebagai sebuah konsepsi pemikiran, memiliki keterbatasan relevansi tersendiri berhadapan dengan realitas masyarakat Indonesia yang masih menghidupi nilai-nilai primordialnya secara radikal. Salah satu keterbatasan relevansi dari konsep identitas majemuk tersebut ialah, penekanannya pada unsur rasionalitas individu. Dalam konteks Indonesia, rasionalitas individu tidak memiliki peran yang signifikan, sebab masyarakat Indonesia masih memegang teguh pada nilai-nilai primordialnya. Bertolak dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa, konsep identitas majemuk Amartya Sen tidak sepenuhnya relevan dalam konteks Indonesia yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai primordialnya. Akan tetapi, pada uraian sebelumnya, prinsip identitas majemuk secara tegas menekankan nilai-nilai solidaritas, toleransi, dan pengakuan terhadap identitas yang lain sebagai basis pengelolaan politik identitas di Indonesia.

5.2 Saran

Di akhir tulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yakni, *pertama*, pemerintah. Menurut penulis, negara atau pemerintah memiliki

kewajiban untuk menciptakan situasi politik yang demokratis bagi setiap masyarakat Indonesia. Situasi politik yang demokratis hanya bisa terwujud, apabila terdapat aturan tegas yang diberlakukan. Dalam arti bahwa, setiap orang yang melakukan tindakan diskriminasi, baik para kontestan politik maupun massa itu sendiri dalam masa kampanye, harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. Sanksi yang sudah ditetapkan harus berlaku bagi semua orang, termasuk para *elite* politik. Sanksi harus diterapkan secara adil bagi semua masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik politisasi identitas tertentu dalam kontestasi elektoral.

Selain itu, pemerintah juga harus bersikap adil dalam hal merumuskan kebijakan. Dalam arti bahwa, pemerintah tidak boleh menjadikan masyarakat mayoritas sebagai titik simpul sebuah kebijakan publik. Sebaliknya, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan publik yang berbasis pada kesejahteraan umum untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, pemerintah juga harus terbuka terhadap suara-suara kritis dari masyarakat maupun para pengamat politik. Pemerintah tidak boleh menciptakan sebuah sistem yang dapat membungkam pendapat atau aspirasi suara-suara kritis demi memperbaiki sistem politik di Indonesia. Ambil misal, tindakan memonopoli ruang publik dan ancaman bagi para pengamat politik yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.

Kedua, partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam usaha meminimalisir politik identitas di Indonesia. Partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah harus bersikap netral. Sikap netral ini ditunjukkan lewat cara mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat, baik masyarakat mayoritas maupun masyarakat minoritas kepada pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Selain itu, partai politik juga harus menanamkan sikap toleransi, solidaritas, dan semangat nasionalisme kepada setiap anggota partai politik. Tujuan menanamkan sikap toleransi, solidaritas, dan juga semangat nasionalisme ini ialah, agar mereka tidak mengejar kepentingan pribadi di dalam partai politik; sebaliknya mengutamakan

kesejahteraan umum sebagai cita-cita partai politik. Lebih jauh lagi, sikap toleransi, solidaritas, dan semangat nasionalisme juga merupakan basis untuk mencegah praktik politik identitas dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Dasar terciptanya politik identitas di dalam perhelatan pilkada dan pilpres tidak terlepas dari gagalnya peran partai politik sebagai organisasi yang berpijak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Partai politik sebagai basis untuk memenangkan sebuah pemilihan umum, harus bersikap adil dan netral ketika mengampanyekan seorang kandidat politik. Dalam arti bahwa, partai politik tidak boleh mempolitisasi nilai-nilai primordial tertentu sebagai alat politik untuk membangun citra negatif terhadap lawan politik. Partai politik harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, sebagai sarana pengatur konflik, dan juga sebagai pihak yang mengusulkan sebuah kebijakan publik kepada pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia.

Ketiga, tokoh agama. Peran tokoh agama tidak bisa dipandang lalu begitu saja. Para tokoh agama memiliki andil yang besar dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat Indonesia yang sangat agamais. Dalam arti bahwa, ketika terjadi politik identitas berbasis agama maka, para tokoh agama harus menjadi tokoh panutan dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran. Para tokoh agama tidak boleh terjebak di dalam sentimen keagamaan tertentu yang melemahkan daya nalar kritis mereka. Sebab, apa yang menjadi pilihan politik para tokoh agama sejatinya turut memengaruhi masyarakat awam.

Keempat, masyarakat. Landasan hidup bernegara yang demokratis dan yang paling kokoh ialah masyarakat. Masyarakat sebagai subyek demokrasi itu sendiri harus memiliki sikap yang kritis terhadap politisasi nilai-nilai primordial tertentu di dalam pemilihan umum. Masyarakat harus mampu membedakan politik yang memecah belah bangsa dan politik yang mempersatukan bangsa. Kemampuan membedakan politik yang memecah belah bangsa, dan politik yang mempersatukan bangsa hanya bisa terwujud, apabila akal budi kritis setiap individu direalisasi di dalam pemungutan suara. Artinya bahwa, ketika memutuskan pilihan politik, setiap individu harus

menghindari-seperlunya menghilangkan tendensi untuk memilih pemimpin politik yang memiliki kesamaan nilai-nilai primordial; sebaliknya, setiap individu harus mampu untuk melihat visi misi, dan juga elektabilitas seorang pemimpin politik.

Kelima, kaum intelektual. Kaum intelektual di sini meliputi para mahasiswa-mahasiswi, para pemikir, para aktivis sosial, dan juga para pengamat politik. Sebuah tatanan sosial masyarakat yang adil hanya bisa terwujud, apabila ada kemauan dan juga kesadaran dari para kaum intelektual untuk menyuarakan suara-suara kritis mereka. Sebuah bangsa akan menjadi sangat totaliter apabila setiap kebijakan pemerintah tidak dikritisi sama sekali oleh kaum intelektual. Atas dasar itu, kaum intelektual diharapkan agar selalu menyuarakan suara-suara kritis mereka dalam memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah dan juga turut andil dalam mengamati setiap proses kebijakan pemerintah. Dasar terciptanya sebuah tatanan sosial masyarakat yang adil sepenuhnya terletak di tangan kaum intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

KAMUS DAN UNDANG-UNDANG

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Appollo, 1997.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Jakarta Timur: Badan Kepegawaian Negara, 2016.

Scruton, Roger. *Kamus Politik Kamus Politik Terj*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

BUKU-BUKU

Ad, As. *Politik Identitas dan Gerakan Sosial Islam (Studi Atas Front Pembela Islam)*. Tangerang: Transwacana Press, 2016.

Anshari, H. Endang Saifudin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Islami dan Nasionalis Sekular Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.

Afriansyah, Anggi. *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lipi Press, 2020.

Al-Barbasy, Ma'mun Murod. *Politik Perda Syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017.

Amirullah. "Pemikiran Egaliterianisme Islam Buya Syafii Maarif dan Relevansinya dengan Problem Indonesia Kontemporer", dalam Moh.

- Shofan, ed. *Merawat Kewarasan Publik*. Jakarta: MAARIF Institute, 2018.
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publications Ltd, 2000.
- Burke, Peter. J dan Jan E. Stets. *Identity Theory*. New York: Oxford University Press, 2009.
- Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Baghi, Felix, ed. *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Bagir, Zainal Abidin dan Jimmy M.I. Sormin, ed. *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2022.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Castells, Manuel. *The Power of Identity: The Transformation Age, Economy, Society, and Cultural*. Australia: Blackwell Publishing, 2003.
- Chalik, Abdul. *Islam, Negara, dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Catt, Helena. *Democracy in Practice*. New York: Routledge, 1999.
- Hardiman, F. Budi. *Massa, Teror, dan Trauma Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Hamdi, Ahmad Zainul dan Muktafi, ed. *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Daulat Press, 2017.

- Ismail, H. Faisal. *Republik Bhineka Tunggal Ika: Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama, dan Sosial Budaya*. Jakarta: Puslitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Khatamai, Mohamad. *Membangun Dialog Peradaban*. Bandung: Mizan, 1998.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia", dalam Ahmad Syafii Maarif, ed. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi, 2010.
- Purwana, Bambang H. Suta. *Identitas dan Aktualisasi Budaya Dayak Kayanatan di Kabupaten Landak Kalimantan Barat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, (edisi revisi) Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1999 [1971].
- Sen, Amartya. *Kekerasan dan Identitas*. Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016.
- . *Collective Choice and Social Welfare*. Netherlands: Elsevier Science, 1970.
- . *Poverty and Famines*. New York: Oxford University Press, 1981.
- . *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knoff, 2000.
- . *Rationality and Freedom* The Belknap Press of Harvard University Press, 2002.
- . *The Idea of Justice*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

Sunaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

------. “Kebebasan dan Kapabilitas Sebagai Kriteria Etis: Kajian Mengenai Pandangan Etika Amartya Sen dalam Ide Kebebasan dan Integrasinya ke dalam Teori Pilihan Sosial”. Disertasi, STF Driyakarya, 2015.

Suaib, Eka. *Etnisasi Kebijakan Publik: Suatu Studi Etnisitas dalam Persaingan Politik Lokal di Kota Kendari*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

Suparlan, Parsudi. *Suku Bangsa dan Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: YPKIK Press, 2004.

Seabrok, Jeremy. *Kemiskinan Global: Kegagalan Model Ekonomi Neoliberalisme*. Yogyakarta: Resist Book, 2006.

Ulum, Bahrul dan Hermanto Harun. *Mengagamakan Politik: Esai-Esai Kearifan Berpolitik*. Jambi: Sulthan Thaha Press, 2008.

Zada, Khamami. *Pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan*. Jakarta: LSIP, 2014.

JURNAL

Abdullah, Assyari. “Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif”. *Jurnan An-nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 41, No. 2, Desember 2017.

Abbas, Moh Rafli. “Ruang Publik dan Ekspresi Politik Identitas”. *Jurnal Society*, Vol. 6, No. 1, Desember 2016.

Al-Farisi, Leli Salman. “Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila”. *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8, No. 2, Februari 2018.

- Andreas, Rino. "Politik Identitas Papua dalam Iklan Telkomsel". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum". *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Alfaqi, Midfal Zusron. "Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas". *Jurnal Pendidikan Pancasila, dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2015.
- Baihaqi, Mohamad. "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir". *Jurnal Al MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Duriana, "Islam di Indonesia Sebelum Kemerdekaan". *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, Januari, Desember 2015.
- Daven, Mathias. "Politik Atas Nama Allah". *Jurnal Ledalero*, Vol. 18, No. 1, Juni 2019.
- ". "Politik Pemusnahan dan Pemusnahan Politik: Telaah Kritis Atas Konsep Hannah Arendt Tentang Totalitarisme". *Jurnal Ledalero*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015.
- Daulay, Sayed Muhammad., Heri Kusmanto, dan Abdul Kadir. "Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018". *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019.
- Dunggio, Kamarudin H dan Johan Jasin. "Validitas Peraturan Daerah yang Bernuansa Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh". *Law, Development, & Justice Review*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2019.

- Faraidiany, Maghfira., Heri Kusmanto dan Warjio. "Politik Identitas dalam Iklan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018". *Jurnal Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019.
- Fautanu, Idzam., Bohori M, dan Heri Gunawan. "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid". *Jurnal Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020.
- Frenki. "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia". *AS-SIYASI-Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No.1, April, 2021.
- Hadiz, Vedi R. "Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 30, No. 1, March 2011.
- Haboddin, Muthar. "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal". *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, Februari 2012.
- Herdiana, Diana. "Konstruksi Politik Identitas Melalui Nilai-Nilai Islam dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 15, No. 2, Maret 2020.
- Hartati, Anna Yulia. "Separatisme dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 2, Juni 2010.
- Haryono, Tri Joko Sri. "Konstruksi Identitas Budaya Bawean". *Jurnal Biokultur*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Ilyas. "Kajian Simbol-Simbol Etnisitas dalam Kampanye, Komunikasi Politik dan Pergeserannya pada Pemilukada Kabupaten Poso". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2012.

- Intan, dan Rafita Ulfia Dilla. “Pengaruh Konflik Agama dalam Membentuk Politik Identitas Pada Pilkada di Kabupaten Poso Tahun 2020”. *Journal of Citizenship*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Juli 2013.
- Kristianus. “Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat”. *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 1, Januari 2016.
- Khamdan, Muh dan Wiharyani. “Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan Fundamentalisme”. *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 18, No. 1, Mei 2018.
- Kiftiyah, Anifatul. “Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia”. *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 3, No. 1, Juli 2019.
- Kristal, Damar. “Perbandingan (DE) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020”. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 18, No. 2, Desember 2021.
- Lelo, Ukuma. “Apartheid Politics in South Africa”. *Jurnal IJSOC: International Journal of Science and Society*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2020.
- Lefaan, Avelinus. “Identity Politics and the Future of Democracy in Papua”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, Vol. 24, No. 1, Januari 2021.
- Masykuri, Romel dan M. Fajar Shodiq Ramadlan. “Analisis Manifestasi Segregasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019”. *Jurnal Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 12, No. 1, April 2021.
- Mahpudin. “Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru”. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 7, No. 2, November 2021.

- Mubarok, Husni. "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11, No. 11, Juni 2018.
- Muhlasul, Ahmad. "Diskursus Pembangunan Manusia dalam Perda Syariah", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 11, No. 2, April 2017.
- Marcia, James E. "Development and Validation of Ego Identity Status". *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 3, No. 5, March 1966.
- Mujab, Saeful dan Azhar Irfansyah. "Komunikasi Politik Identitas K.H Ma'aruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019". *Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.
- Maulidia, Hanifa. "Relasi Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Emile Durkheim dan Karl Max". *Jurnal Sosiologi USK (Media, Pemikiran & Aplikasi)*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019.
- Nuradhawati, Rira. "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia". *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2, No. 1, Februari 2019.
- Novianti, Dewi dan Sigit Tripambudi. "Studi Fenomenologi: Tumbuhnya Prasangka Etnis di Yogyakarta". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, Mei-Agustus 2014).
- Negong, Yohanes Yoelvan. "Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 2013 di Kota Kupang". *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017.
- Oktavia, Nada dan Hairul Dharma Widagdo. "Politik Identitas: Konstruksi Pemikiran Amy Gautamann dalam Menyikapi Pesta Politik Tahun 2019". *Jurnal LoroNG*, Vol. 7, No. 1, November 2018.
- Pranowo, Suaib Amin. "Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya". *Jurnal Renaissance*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2020.

- Pajriah, Sri. "Pemikiran Mohammad Natzir Tentang Hubungan Agama dan Negara Serta Polemiknya dengan Soekarno". *Jurnal Artefak: History and Education*, Vol. 4, No. 2, September 2017.
- Pressman, Steven dan Gale Summerfield. "The Economic Contributions of Amartya Sen". *Journal Review of Political Economy*, Vol. 12, No. 1, October 2014.
- Purbasari, Verbena Ayuningsih dan Suharno. "Interaksi Sosial Etnis Cina-Jawa Kota Surakarta". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. Vol. 21, No. 1, Juni 2019.
- Prayogi, Irfan dan Fernanda Putra Adela. "Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017". *Jurnal Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2, Juli 2019.
- Rosadisastra, Andi. "Membangun Identitas Peradaban di Era Global: Telaah Pemikiran Amartya Sen", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2014.
- Ronaldo, Riki dan Darmaiza. "Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019". *Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 03, No. 01, Juni 2021.
- Romadlon, Suryo Gilang. "Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016.
- Romli, Lili. "Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia". *Journal Indonesia Political Science Review*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.
- Suparto, Diryo. "Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung". *Jurnal Politika*, Vol. 4, No. 1, April 2013.
- Saleh, Muhammad., Yuslim, dan Bakaruddin Rosyidi. "Politik Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah: Peranan Etnis Tionghoa dalam Pilkada

- Kota Tebing Tinggi Tahun 2017". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, September 2018.
- Surya, Dian Ariyani., Ali Noerzaman, dan Usni. "Politik Identitas dibalik Panggung Pilkadaes", *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021.
- Syukur, Abdul. "Islam, Etnisitas, dan Politik Identitas: Kasus Sunda". *Jurnal Miqot*, Vol. 35, No. 2, Juli-Desember 2011.
- Sulustiwati, Irma. Gejolak Politik dan Ekonomi Afrika Pasca Perang Dunia II". *Jurnal Istorial: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 17, No. 1, Maret 2021.
- Solikhin, Ahmad. "Islam, Negara, dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas". *Journal of Governance*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Simamora, Sri Devi Valentina dan Turnomo Rahardjo. "Isu Identitas Etnis dan Agama dalam Konteks Politik (Kasus Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018)". *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 7, No. 4, September 2019.
- Sunaryo. "Amartya Sen tentang Teori Keadilan John Rawls: Kritik Pendekatan Komparatif atas Pendekatan Institusionalisme". *Jurnal Respons*, Vol. 23, No. 1, Juli 2018.
- Triana, Rara dan Rahel Liska. "Politik Identitas: Apakah Politik Identitas akan Mempengaruhi Popularitas?". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No. 2, Desember 2020.
- Qurtuby, Sumanto Al. "Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia". *Jurnal MAARIF*, Vol. 13, No. 2, Desember 2018.
- Widyawati. "Menguatnya Politik Identitas di Indonesia baik karena Faktor Agama, Sosial, dan Etnis". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021.

Yulianto, Otto Adi. "Wacana Identitas dalam Perspektif Amartya Sen: Upaya Transformasi Laknat Menjadi Berkat". *Jurnal Dignitas*, Vol. 5, No. 1, 2008.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Etnisitas#:~:text=Kelompok%20etnik%2C%20etnis%20atau%20suku,garis%20keturunan%20yang%20dianggap%20sama> diakses pada 22 Agustus 2022.

Lasswell, Harol D. "Politik Indonesia: Who Gets What, When, and How"
<https://majalah.kliksaja.co/2021/03/politik-indonesia-who-gets-what-when-and-how/>, diakses pada 29 Maret 2022.

Putra, Pandika Adi. "10 Suku Terbesar di Indonesia, nomor 3 dari Sumut",
<https://sumut.inews.id/berita/10-suku-terbesar-di-indonesia-nomor-3-dari-sumut#:~:text=Suku%20Jawa%20menjadi%20suku%20dengan,negeri%20seperti%20Suriname%20dan%20Malaysia.html>, diakses pada 27 Juni, 2022.

Sen, Amartya, "Biographical", <http://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1998/sen/biographical.html> diakses pada 13 Oktober 2022.

Tolo, Emilianus Yakob Sese. "Di bawah Bayang-bayang Ahok: Politik Identitas dalam Pemilu di NTT", <http://tirto.id/di-bawah-bayang-bayang-ahok-politik-identitas-dalam-pemilu-di-ntt-dniM.html>, diakses pada 24 Mei 2023